KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Bupati Teriak DBH Migas Kecil - Aspirasi Daerah Wajib Diperhatikan
Tanggal : Kamis, 15 Desember 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Bupati Teriak DBH Migas Kecil

Aspirasi Daerah Wajib Diperhatikan

SENAYAN menyebut banyak daerah yang mempunyai kekayaan sumber daya mineral, tapi masyarakat tidak bisa menikmatinya, bahkan cenderung miskin. Sehingga kesenjangan ini menimbulkan kekecewaan.

Anggota Komisi VII DPR Abdul Wahid meminta Pemerintah Pusat (Pempus) berlaku adil dan transparan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah penghasil minyak dan gas (migas). Caranya, dengan membuat satu mekanisme yang memungkinkan daerah bisa melakukan pengecekan langsung.

"Sehingga selain Pempus yang memegang data, daerah juga bisa mengecek keberadaan sumur migas berikut potensinya," ujar Wahid dalam keterangannya, kemarin.

Dengan metode itu, kata Wahid, masing-masing daerah bisa mengecek dan ikut mengontrol. Apalagi kadang-kadang sumur di satu kabupaten, tapi reservoirnya atau wadah minyak ada di kabupaten lain.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menekankan, masyarakat membutuhkan keadilan dalam mendapatkan haknya. Namun, keadilan itu tidak sempurna jika dalam pelaksanaannnya tidak ada pemerataan. Pemerataan ini sepatutnya sejalan dengan potensi kekayaan yang ada di daerah tersebut.

"Di Riau itu menyumbang minyak dan gas gede banget, tapi jalan-jalan di Riau banyak yang pada hancur," kritik Legislator Dapil Riau II itu.

Selain itu, Wahid menyebut besarnya potensi lain di Riau, salah satunya kelapa sawit. Disebutkan, anggaran di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mencapai Rp 71-72 triliun. Akan tetapi, dana yang kembali ke masyarakat hanya Rp 2 triliun.

Pertanyaannya, kata Wahid, yang Rp 70 triliun untuk apa, sementara sumbangan truk pengangkut sawit terhadap kerusakan jalan sangat tinggi.

Lalu, dari mana daerah membangun jalan dan infrastruktur yang hancur. "Inilah kadang-kadang kebijakan begini yang tidak sinkron," kritiknya.

Atas fakta tersebut, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR berharap, pernyataan Bupati Kepulauan Meranti, Riau Muhammad Adil menjadi pembelajaran bagi pemerintah. Khususnya dalam melihat kembali bahwa DBH yang dialokasikan dalam undang-undang masih kecil untuk daerah penghasil minyak dan gas.

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mendesak Pemerintah segera mengevaluasi persentase DBH untuk daerah penghasil minyak dan gas (migas). ■ TIF